KAJIAN INDIKATOR IKLIM USAHA PERDAGANGAN DKI JAKARTA

Bagas Haryotejo [1] dan Sefiani Rayadiani[2]

ABSTRAK

Iklim usaha suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Secara umum iklim usaha perdagangan di Indonesia belum cukup menunjukkan kondisi yang memuaskan. Hasil pembobotan iklim usaha perdagangan untuk melihat derajat penting atau skala prioritasnya diperoleh lima indikator prioritas yang dinilai memberikan pengaruh / dampak luas terhadap iklim usaha perdagangan, yaitu : (1) indikator perizinan ***(0,146)****; (2) kondisi keamanan* ***(0,146)****; (3) kondisi lingkungan bisnis* ***(0,127)****; (4) jasa infrastruktur publik* ***(0,114)****; dan (5) peraturan ketenagakerjaan* ***(0,102)****. Sedangkan indikator yang dinilai sangat tidak memberikan pengaruh adalah akses pembiayaan perusahaan (dengan nilai bobot* ***0,059****). Hasil penilaian iklim usaha di Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan 10 indikator terbobot menunjukkan DKI Jakarta, dengan nilai 3,178 dan termasuk ke dalam kategori cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah adalah kondisi keamanan (3,282), peraturan ketenagakerjaan (3,191), dan kepabeanan–kepelabuhan (3,175); sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,587), kondisi tanah / lahan (2,824), dan perizinan (2,893). Implikasi kebijakannya adalah bahwa peluang perbaikan iklim usaha perdagangan ternyata masih dapat dan sangat perlu dilakukan, paling tidak dengan memperbaiki kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya. Kondisi yang sangat diharapkan dari hasil "cukup kondusif" tersebut adalah adanya komunikasi dua arah antara pengusaha dengan pemerintah yang bekerjasama dan yang mampu menjalin kemitraan dalam berbagai kegiatan.*

Pendahuluan

Berbicara tentang iklim usaha tidak terlepas dari daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim usaha suatu negara atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Untuk Indonesia, telah

[1] Peneliti pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan Badan Litbang Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Telp. 08129963004, e-mail. bags9apr@gmail.com

[2] Calon Peneliti pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan Badan Litbang Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Telp. 021-23528694, e-mail. sefiani_r@yahoo.co.id

banyak pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan iklim usaha atau iklim investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator yang disusun. Laporan tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing, iklim usaha maupun iklim investasi di Indonesia senantiasa mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya).

Kajian yang dilakukan oleh WEF (*World Economic Forum*) mengukur daya saing Indonesia dengan 5 (lima) indikator yang signifikan, tiga faktor pada tataran makro dan dua indikator pada tataran mikro. Indikator tataran makro meliputi: (1) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; (2) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat layanan; dan (3) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sedangkan tataran indikator mikro, meliputi: (1) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan; dan (2) lemahnya iklim persaingan usaha.

Survey World Bank, dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: memulai kegiatan usaha, regulasi ketenagakerjaan, pajak dan kepatuhan serta penyelesaian kepailitan, menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Kajian lainnya dilakukan oleh IMD (*The International Institute for Management Development*). IMD menyatakan bahwa rendahnya daya saing industri di Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh empat hal pokok, yaitu: (1) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerja di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga; (2) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, buruknya berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih; (3) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional; dan (4) keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Statistik peringkat daya saing tersebut memberikan indikasi bahwa, Indonesia semakin kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (misalnya Malaysia, Thailand, Filipina) yang justru cenderung mengalami perbaikan setelah krisis ekonomi. Kondisi ini tentunya perlu dicermati, mengingat peringkat tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri, dalam Rencana Pembangunan Jangka Mene-

ngah (RPJM) 2004-2009 telah mengidentifikasikan masalah-masalah yang terkait dengan dunia industri dan perdagangan, antara lain: (1) KKN dan layanan yang buruk, mengakibatkan tingginya biaya *overhead*. Kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan, bahwa (a) pengeluaran untuk pungutan dan biaya layanan umum menambah biaya *overhead* sekitar 8,7% - 11,2%; (b) *cost of money* yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi; (c) administrasi perpajakan yang belum optimal; (d) kandungan impor untuk produk ekspor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara (*intermediate*) dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28% pada tahun 1993 menjadi 30% pada tahun 2002; (e) lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri nasional relatif rendah, meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi; (f) kualitas SDM relatif rendah; (g) iklim persaingan yang kurang sehat, di mana banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi "mendekati" monopoli; yang ditunjukkan oleh tingginya Indeks Konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2); (h) struktur industri masih lemah; (i) peranan industri kecil dan menengah (termasuk industri rumah tangga) masih minim; dan (j) sebaran industri yang terpusat di Pulau Jawa.

Secara umum, pengembangan iklim usaha perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempunyai indikator yang dapat digunakan secara berkala untuk memantau iklim investasi baik dalam kerangka perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey pada aspek bisnis (mikro) dengan DKI Jakarta sebagai kawasan studi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya.

Penelitian ini sangat penting mengingat upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan di berbagai wilayah di Indonesia yang karakteristik iklim usahanya berbeda-beda.

Tujuan utamanya adalah menyusun indikator kondusifitas atau kemajuan iklim usaha di DKI Jakarta selaku ibukota negara Indonesia. Sedangkan tujuan khusus, yaitu melakukan survey atas berbagai indikator iklim usaha utama secara terinci, baik dari segi peraturan maupun implementasinya yang dapat diukur, dianalisis dan dipresentasikan secara transparan sehingga lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakannya.

Survey lapangan dibatasi terhadap kegiatan sektor industri dan jasa, khususnya sektor perekonomian yang secara nasional dan regional mempunyai sumbangan yang berarti terhadap perekonomian, mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar, mempunyai potensi ekspor, dan saat ini cenderung mengalami kelesuan usaha. Sedangkan

komoditi ditetapkan dari lima kelompok industri manufaktur dan satu sektor jasa. Kelima kelompok komoditi tersebut adalah (1) alas kaki dan sepatu; (2) tekstil dan produk tekstil; (3) makanan dan minuman; (4) elektronik; dan (5) bahan dan barang kimia. Pemilihan kelima kelom-pok komoditi tersebut didasarkan pada beberapa hal, antara lain penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, nilai ekspor yang cukup tinggi, nilai tambah yang tinggi, dan beberapa merupakan bagian dari program pengembangan 10 komoditas andalan prioritas. Sedangkan pada sektor jasa, diwakili oleh perhotelan.

Iklim Usaha, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Iklim usaha didefinisikan sebagai kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern, 2002). Terdapat tiga faktor utama yang menyusun iklim usaha, yaitu: (1) Fundamental Makro – dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaing-an pasar, sosial, dan stabilitas politik; (2) Pemerintahan dan Kelembagaan – transparansi dan efisiensi dari kebijakan; perpajakan; legal sistem; kekuatan sektor finansial; serta kondisi ketenaga-kerjaan; dan (3) Infrastruktur – trans-portasi (jalan dan pelabuhan), teleko-munikasi, listrik dan air.

Dalam Undang–Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, iklim usaha didefinisikan sebagai *kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang men-jadi tangguh dan mandiri.* Iklim usaha yang kondusif akan berpengaruh pada pada produktivitas dan lebih lanjut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil survey APO *(Asian Productivity Organization)* tahun 2004 terhadap pertumbuhan Total Faktor Produktivitas (TFP) negara-negara ASEAN selama tahun 1980-2000 menunjukkan perbandingan untuk masing-masing negara, yaitu Indonesia -0,80%, Malaysia 1,29%, Philipina -0,37%, Singapura 0,78%, Thailand 1,00%, Vietnam 3,27%.

Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas, yaitu total produktivitas yang seimbang antara pertumbuhan investasi modal dan pertumbuhan sumber daya manusia *(human capital / knowledge)* akan menghindarkan pertumbuhan ekonomi yang semu. Malaysia, Thailand dan Vietnam merupakan contoh suatu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertumbuhan total faktor produktivitas (kapital dan tenaga kerja). Pertumbuhan ekonomi secara efisien (produktif) menjadi modal dasar bagi persaingan regional dan global.

Dari aspek tenaga kerja pada sektor manufaktur, persentase rata-rata biaya tenaga kerja terhadap total biaya yang dikeluarkan menunjukkan bahwa Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan India, Malaysia dan Korea, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 2 :

Tabel 1. *Total Factor Productivity* negara ASEAN tahun 1980 – 2000

No	Tahun	Indonesia	Malaysia	Philipina	Singapura	Thailand	Vietnam
1.	1980 – 1984	-0,32	0,74	-2,34	-0,29	0,37	NA
2.	1985 – 1989	-0,47	0,20	0,49	1,25	3,66	2,02
3.	1990 – 1994	0,82	3,36	-1,68	2,33	2,14	4,12
4.	1995 – 1999	-3,67	0,32	1,03	-0,41	-2,16	3,22
5.	***1980 – 2000***	***-0,80***	***1,29***	***-0,37***	***0,78***	***1,00***	***3,27***

Sumber: Laporan Survey APO (2004)

Tabel 2.
Perbandingan Persentase Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Biaya pada Sektor Manufaktur di Beberapa Negara Asia

No	Komoditi	Indonesia	India	Malaysia	Korea
1.	Makanan	4,2	3,7	3,2	7,7
2.	Kulit dan bahan dari kulit	7,7	4,4	16,7	8,1
3.	Kimia	4,9	4,6	2,9	5,5
4.	Plastik	6,0	4,9	12,9	12,0
5.	Besi dan Baja	2,2	4,9	5,0	5,9
6.	Karet	4,8	5,3	10,0	13,8
7.	Logam non besi	3,4	6,1	5,1	5,8
8.	Elektronik	4,6	7,1	6,4	9,1
9.	Tekstil	4,7	7,2	8,8	13,4
10.	Produk metal	6,1	7,4	10,7	13,7
11.	Produk kayu	5,9	7,6	10,9	12,6
12.	Kaca	7,5	7,9	8,1	14,0
13.	Mesin non elektrik	6,3	8,4	6,6	11,2
14.	Peralatan transport	3,9	10,2	6,0	10,7
15.	Percetakan	10,1	13,9	16,7	16,6
	Rata-rata	***5,5***	***6,9***	***8,7***	***10,7***

Sumber: UNIDO

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat perusahaan merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi (terutama dari sumber modal asing) untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta menciptakan dampak berantai *(multiplier effect)* tumbuhnya iklim usaha.

Dalam hal investasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur investasi di Indonesia, diantaranya:

1. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Mutlak bagi Penanaman Modal (Keppres 96/2000)
2. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal yang Dalam Modal Perusahaan Ada Pemilikan Warga Negara Asing Dan Atau Badan Hukum Asing (Keppres 96/2000 dan 118/2000)
3. Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Patungan Antara Modal Asing dan Modal Dalam Negeri (Keppres 118/2000)
4. Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu (Keppres 96/2000)
5. Daftar Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil (Keppres 127/2001)
6. Daftar Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka bagi Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan (Keppres 127/2001).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal yang juga penting dalam upaya menarik investor, selain ekonomi makro yang kondusif, juga kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, hendaknya juga menjadi supervisor sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondusifitas iklim usaha di suatu daerah adalah biaya transaksi yang mencakup: (1) biaya untuk memulai/mengembangkan sebuah sistem; (2) biaya yang terukur dalam nilai yang dipertukarkan; (3) biaya perlindungan hukum; (4) biaya penyelenggaraan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut paling tidak terdapat enam aktivitas yang berkaitan dengan biaya transaksi, yaitu:

1. Upaya mencari informasi tentang harga dan kualitas barang, termasuk upaya mendapatkan pembeli dan penjual serta informasi yang relevan
2. Proses tawar-menawar
3. Pembuatan kontrak
4. Monitoring terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama
5. Kemungkinan bahaya yang timbul bila pelaku usaha gagal melakukan yang tercantum dalam kontrak
6. Perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pelanggaran terhadap pihak ketiga

Kajian KPPOD (2003) terhadap daya tarik investasi daerah mengguna-kan beberapa variabel–konsep yang mempunyai variasi nilai/intensitas/jumlah yang menggambarkan atribut dari variabel tersebut. Variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah adalah (1) kelembagaan; (2) sosial politik; (3) ekonomi daerah; (4) tenaga kerja dan produktifitas; dan (5) infrastruktur fisik.

Masing-masing daerah memiliki kekhasan atas potensi, baik dari aspek kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas maupun ketersediaan infrastruktur. Kemampuan suatu daerah dalam meningkatan perekonomiannya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Penetapan Indikator Iklim Usaha Perdagangan

Struktur hierarki iklim usaha perdagangan dibuat dalam tiga level, yang masing-masingnya memberikan pengaruh terhadap level lainnya secara bertingkat dari bawah ke atas. Indikator, merupakan hierarki level 1, yang terdiri atas sepuluh indikator (yang ditetapkan) dan memberikan pengaruh terhadap level di atasnya (tujuan: iklim usaha perdagangan). Sub-Indikator merupakan hierarki level 2, yang masing-masing merupakan faktor pengaruh bagi indikator-indikator di level atasnya. Parameter Ukur, merupakan hierarki level 3, yang memberikan ukuran-ukuran pada sub-indikator (level di atasnya). Kemudian dilakukan pembobotan atas indikator-indikator.

Hasil pembobotan atas indikator dengan Model TEV (*Tree Diagram and Expected Value*) diperoleh berdasarkan persepsi responden (pakar), dengan bantuan kuisioner. Hasil yang diperoleh disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pembobotan Indikator dengan Model TEV

a_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bobot
a_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}	a_{18}	a_{19}	a_{110}	0.146
a_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}	a_{28}	a_{29}	a_{210}	0.089
a_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}	a_{38}	a_{39}	a_{310}	0.102
a_4	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}	a_{48}	a_{49}	a_{410}	0.077
a_5	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}	a_{58}	a_{59}	a_{510}	0.081
a_6	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}	a_{68}	a_{69}	a_{610}	0.114
a_7	a_{71}	a_{72}	a_{73}	a_{74}	a_{75}	a_{76}	a_{77}	a_{78}	a_{79}	a_{710}	0.099
a_8	a_{81}	a_{82}	a_{83}	a_{84}	a_{85}	a_{86}	a_{87}	a_{88}	a_{89}	a_{810}	0.146
a_9	a_{91}	a_{92}	a_{93}	a_{94}	a_{95}	a_{96}	a_{97}	a_{98}	a_{99}	a_{910}	0.059
a_{10}	a_{101}	a_{102}	a_{103}	a_{104}	a_{105}	a_{106}	a_{107}	a_{108}	a_{109}	a_{1010}	0.127

Keterangan :

a_1 = Indikator Perizinan
a_2 = *Indikator Perpajakan*
a_3 = *Indikator Peratruran Ketenagakerjaan*
a_4 = *Indikator Jalan Raya*
a_5 = *Indikator Kepabeanan dan Pelabuhan*
a_6 = *Indikator Jasa Infrastruktur Publik*
a_7 = *Indikator Tanah / Lahan*
a_8 = *Indikator Kondisi Keamanan*
a_9 = *Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan*
a_{10} = Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis

Hasil perhitungan atas model tersebut di atas, berupa persentase berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing indikator dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.
Hasil Pembobotan Indikator (Level 1) Iklim Usaha Perdagangan

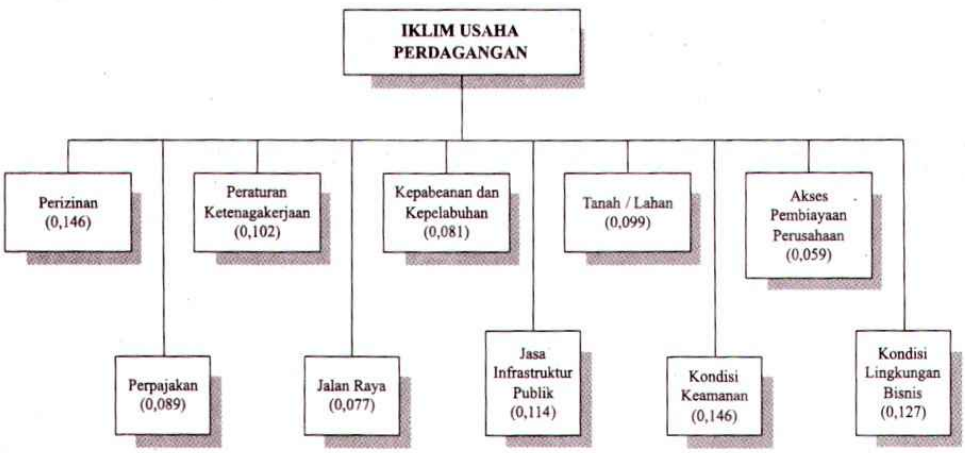

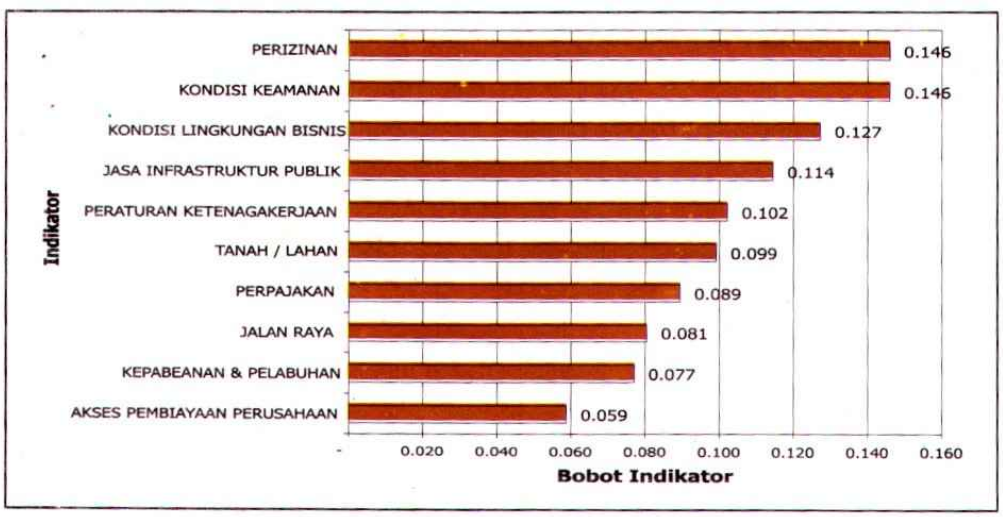

Gambar tersebut di atas memberi-kan gambaran bahwa indikator- indikator utama yang mempengaruhi iklim usaha perdagangan adalah indikator perizinan (14,60%), yang dipengaruhi pula oleh kondisi keamanan (14,60%), kondisi lingkungan bisnis (12,70%), jasa infrastruktur publik (11,40%) dan peraturan ketenagakerjaan (10,20%). Jika dicermati bahwa distribusi prioritas atas indikator-indikator iklim usaha tidak menunjukkan penilaian yang berbeda nyata.

Indikator yang paling tidak menjadi prioritas adalah akses pembiayaan perusahaan (5,59%) karena pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel sebagian besar adalah PMA dan PMDN. Selain itu, kenyataan bahwa untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan yang cukup sulit memberikan dampak tersendiri bagi pelaku usaha yang semakin tidak berharap banyak atas bantuan pembiayaan dari perbankan. Ditambah dengan suku bunga kredit yang cukup tinggi, semakin memberikan implikasi bahwa akses pembiayaan perbankan semakin tidak menarik dan tidak menjadi prioritas.

1. Indikator Perizinan

Berdasarkan penelusuran lapangan, jenis perizinan industri dan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut: (1) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, (2) Tanda Daftar Industri, (3) Izin Usaha Industri, (4) Surat Tanda Daftar Gudang, (5) Tanda Daftar Perusahaan, (6) Surat Izin Usaha Perdagangan, (7) Izin Perluasan, (8) Surat Keterangan Penyelenggaraan Pameran, Konvensi, dan Seminar Dagang, (9) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, (10) Pendaftaran Kartu Petunjuk Manual Berbahasa Indonesia dan Kartu Garansi Bagi Produk / Barang Teknologi Informasi dan Elektronika, (11) Izin perpanjangan tanda pabrik, (12) Surat Izin Usaha Pasar Modern, (13) Izin Usaha Akomodasi Hotel, (14) Izin Pemboran Air Bawah Tanah, (15) Izin Pengambilan atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah, (16) Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), (17) Izin Operasi Angkutan, (18) Izin Undang-Undang Gangguan, (19) Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya.

Dalam perolehan perizinan, ditemukan beberapa penyimpangan yang terjadi, baik penyimpangan waktu maupun biaya, sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut ini :

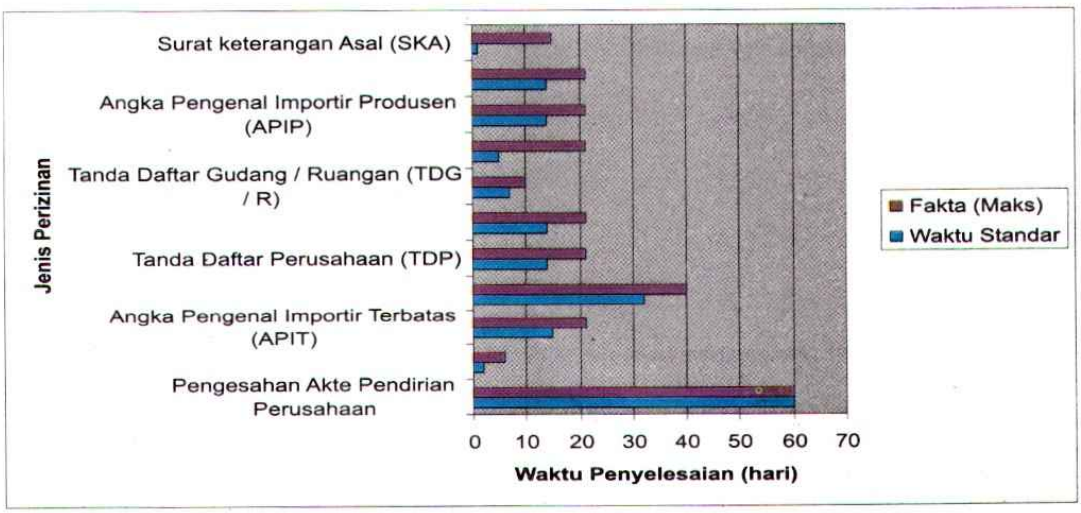

Gambar 2. Penyimpangan Waktu Proses Perizinan di DKI Jakarta

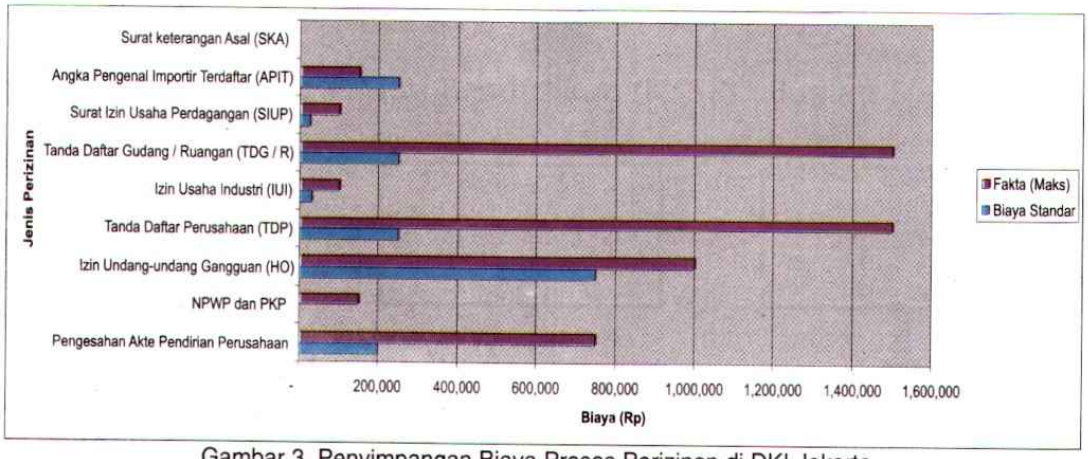

Gambar 3. Penyimpangan Biaya Proses Perizinan di DKI Jakarta

Berdasarkan fakta lapangan di atas, dan juga persepsi pelaku usaha di DKI Jakarta, hasil penilaian parameter ukur dan sub-indikator atas indikator perizinan disajikan berikut ini :

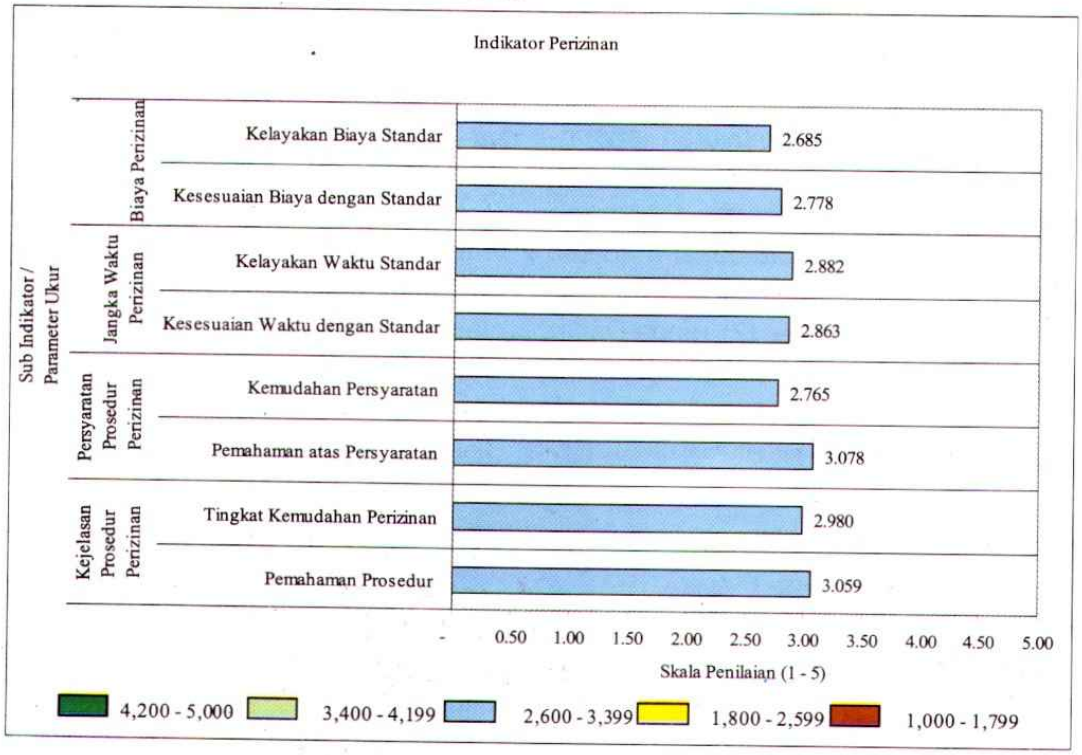

Gambar 4. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Perizinan di DKI Jakarta

Hasil penilaian dalam gambar 4, yang masih menunjukkan kondisi mendekati buruk adalah pada parameter kelayakan dan kesesuaian biaya dan waktu standar, dan kemudahan persya-ratan. Sedangkan pemahaman atas prosedur dan pemahaman atas persya-ratan relatif cukup baik.

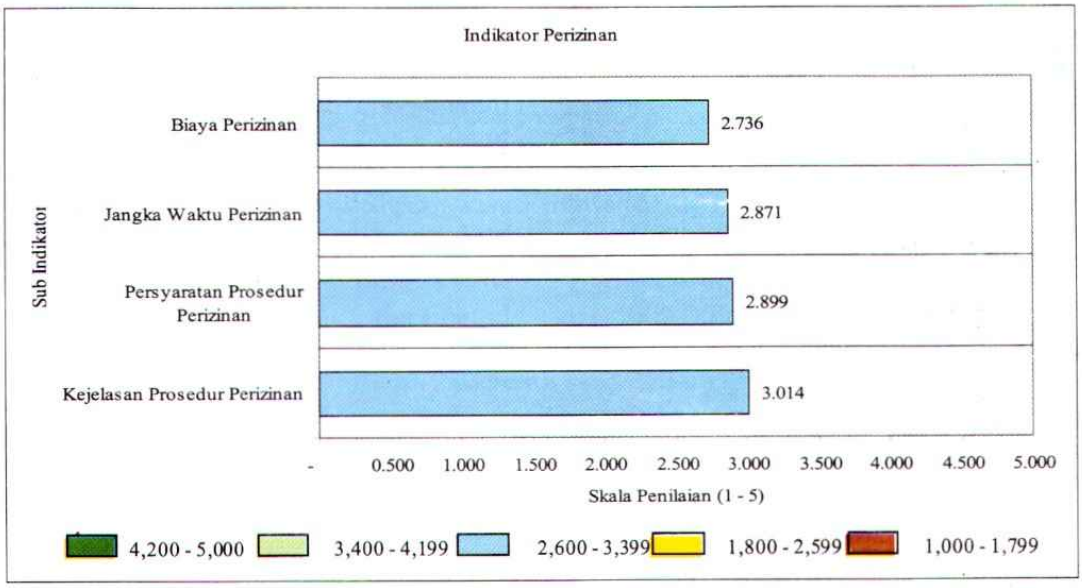

Gambar 5. Penilaian Sub Indikator Ukur atas Indikator Perizinan di DKI Jakarta

Hasil penilaian atas sub-indikator perizinan menunjukkan semua berada pada kategori sedang, tetapi kecenderungan beberapa sub-indikator mendekati kategori buruk, yaitu biaya perizinan, jangka waktu pelaksanaan, dan persyaratan prosedur.

Hasil penilaian atas indikator perizinan di DKI Jakarta adalah 2,983 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400). Beberapa hal yang perlu dibenahi adalah kesesuaian jangka waktu perizinan dan meminimalkan penyimpangan pada biaya perizinan

2. Indikator Perpajakan

Pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dan pasal 25 serta PPN dibayarkan secara rutin oleh pelaku usaha. Dalam pengurusan pajak tersebut sebagian besar pelaku usaha menggunakan jasa konsultan untuk mengurus pajak. Waktu yang diperlukan untuk pengisian form pajak bulanan rata-rata 1 jam-4 hari, tergantung kompleksitas usaha, sedangkan untuk pajak tahunan waktu yang diperlukan 2-30 hari.

Dalam pengajuan restitusi PPN selain kejelasan peraturan, pengurusan yang dilakukan juga relatif mudah, namun persyaratan yang diperlukan untuk relatif banyak.

Untuk pajak daerah, secara umum pajak daerah yang ada dan dibayarkan hampir sama dengan daerah lain. Walaupun rata – rata tidak menyebutkan jumlah pajak karena untuk menentukan besarnya jumlah pajak tergantung dari berbagai variabel. Untuk pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, beberapa perusahaan menyebutkan besarnya sekitar Rp. 153.000 hingga Rp. 1.000.000 tergantung pada jumlah titik yang dibor. Sedangkan pajak

reklame besarnya sekitar Rp. 1.559.767, yang tergantung pada lokasi dan jenis reklame.

Retribusi lain yang dibayarkan perusahaan di antaranya adalah retribusi pengawasan penggunaan mesin yang besarnya Rp. 827.300, retribusi ketenagakerjaan sebesar Rp. 200.000 - Rp. 2.250.000, dan retribusi untuk izin penyimpangan waktu dan pengawasan mesin yang besarnya Rp. 100.000,00/ bulan.

Penilaian parameter ukur atas indikator dan sub-indikator perpajakan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:

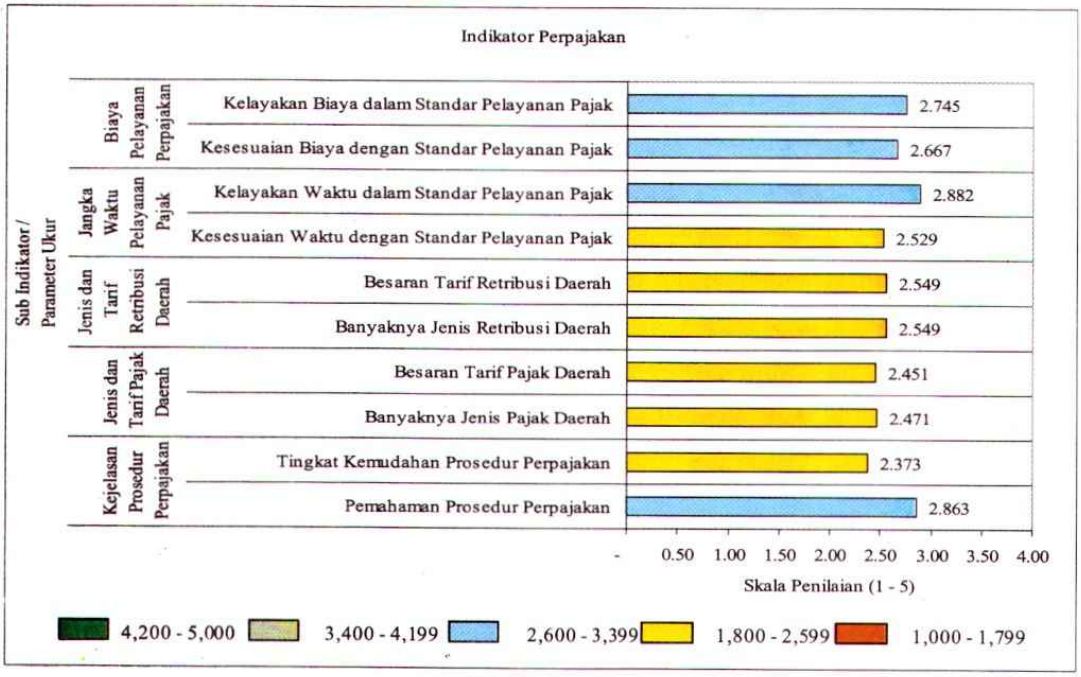

Gambar 6. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Perpajakan di DKI Jakarta

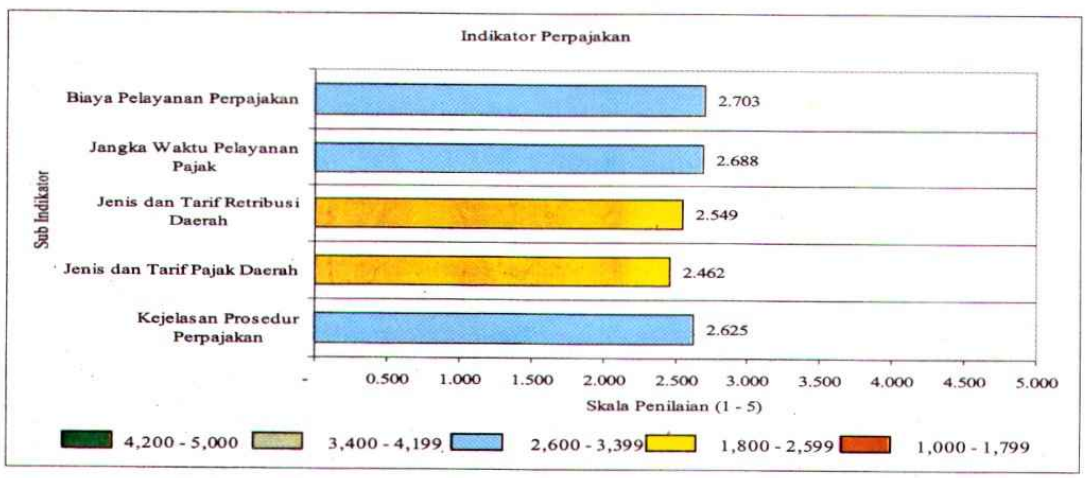

Gambar 7. Penilaian Sub Indikator atas Indikator Perpajakan di DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan bah-wa penilaian atas indikator perpajakan masih relatif buruk, terutama pada ke-sesuaian waktu dengan standar, tingkat kemudahan prosedur perpajakan, dan besaran serta jumlah pajak/ retribusi daerah. Parameter ukur lainnya, mes-kipun berada pada kategori sedang, tetapi kecenderungannya mendekati posisi buruk. Kondisi tersebut mempe-ngaruhi sub indikator, di mana ditunjuk-kan bahwa pajak dan retribusi daerah berada pada kategori kurang layak, dan masih menjadi beban bagi pelaku usaha. Demikian pula dengan kejelasan pro-sedur dan jangka waktu pelayanan pajak yang cenderung buruk.

Hasil penilaian untuk indikator perpajakan di DKI Jakarta adalah 2,587 dan termasuk ke dalam kategori buruk (selang interval 1,800 – 2,599). Kondisi perpajakan di DKI Jakarta masih sangat memerlukan pembenahan, baik dari segi regulasi maupun implementasinya.

3. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

Penduduk usia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang masing-masing berjumlah 4,10 juta orang dan 2,52 juta orang. Sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan (35,58%), jasa (23,05%) dan industri (20,88%). Jika diamati berdasarkan status pekerjaannya ada sebesar 68,07% sebagai buruh, pengusaha 28,97% dan sebagai pekerja keluarga sebesar 2,96%. Jumlah pencari kerja berdasarkan data Sakernas BPS DKI Jakarta tahun 2004 tercatat sebanyak 602,74 ribu orang; sedangkan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 20,62 ribu orang, 300,58 ribu orang pencari kerja yang masih belum ditempatkan sebanyak 6,85 ribu orang dari 11,85 ribu lowongan kerja yang ada.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2093/2005 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2006 di Propinsi DKI Jakarta, ditetapkan upah minimum yang diterima pekerja adalah Rp. 819.100 per bulan per orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 711.843 per orang per bulan (sesuai Keputusan Gubernur DKI No. 2515 / 2004). Besaran tersebut dinilai cukup sesuai. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha membayarkan upah tenaga kerja pada kisaran Rp. 750.000–900.000. Kisaran tersebut tidak secara spesifik menunjukkan nilai yang dibayarkan pelaku usaha kepada tenaga kerjanya.

Pemahaman atas peraturan ketenagakerjaan cukup baik, terlihat dari peraturan-peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) relatif se-dikit, meskipun ada beberapa perusaha-an yang menyatakan jumlah kasus PHK antara 6-10 kasus dalam tiga bulan terakhir (akumulasi). Selain itu, konflik atau kasus yang terjadi antarperusahaan dan tenaga kerja masih seputar masalah pesangon, jaminan sosial dan kenaikan UMP, tetapi tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi hubungan industrial yang ada.

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta disajikan pada gambar berikut ini:

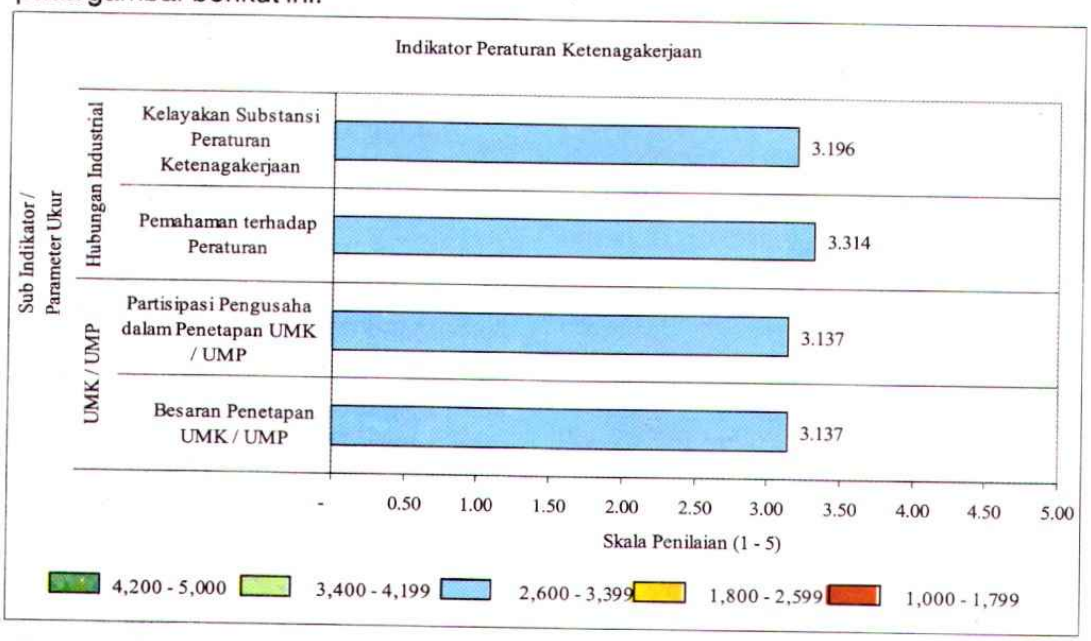

Gambar 8. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Peraturan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

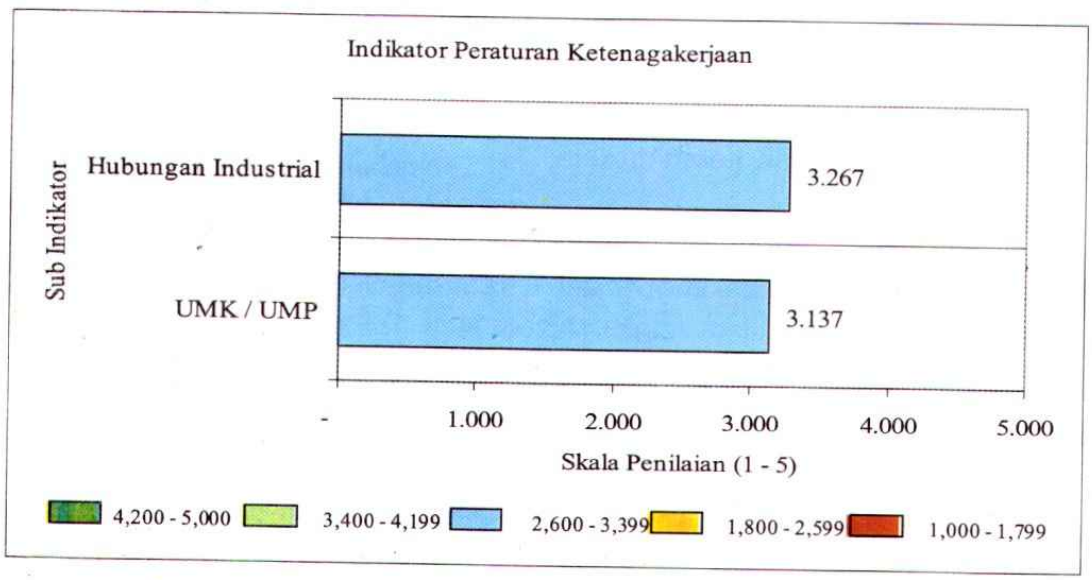

Gambar 9. Penilaian Sub Indikator atas Indikator Peraturan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta

Parameter ukur dan sub indikator tersebut di atas memperlihatkan kondisi peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta relatif cukup baik, ditinjau dari hubungan industrial dan UMK / UMP.

Hasil penilaian untuk indikator peraturan ketenagakerjaan di DKI Jakarta adalah 3,191 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,800- 3,399).

4. Indikator Jalan Raya

DKI Jakarta memiliki infrastruktur jalan yang memadai, baik dari kualitas maupun kuantitas. Statistik jalan raya DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2004, panjang jalan di DKI Jakarta adalah 7.616.269,24 m, dengan luas 47.906.134,32 m.

Meskipun kualitas dan kuantitas jalan di DKI Jakarta cukup memadai, tetapi volume kendaraan yang melalui-nya relatif banyak. Kemacetan merupa-kan masalah utama yang terjadi. Hal ini pulalah yang menjadi kendala distribusi produk bagi para pelaku usaha. Terlebih lagi dengan tingkat pelanggaran pe-raturan lalu-lintas di DKI Jakarta terma-suk tinggi. Titik–titik rawan kemacetan, hampir semua ruas jalan di DKI Jakarta bisa menjadi titik rawan kemacetan apalagi pada jam – jam sibuk lalu lintas.

Untuk distribusi barang kebanyakan perusahaan di DKI Jakarta telah memiliki sarana angkutan. Hal tersebut selain bertujuan untuk penghematan biaya sewa alat angkut juga untuk lebih menjamin kelancaran distribusi.

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Parameter ukur tersebut di atas menunjukkan kepadatan jalan masih berada pada kategori buruk, dan hal tersebut menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Selain itu, yang menunjukkan kecenderungan buruk (meskipun masuk kategori sedang /cukup) adalah kelayakan dan kesesuaian biaya dengan standar yang ada. Tampaknya intensitas pungli di sepanjang jalan di DKI Jakarta masih banyak dialami oleh pelaku usaha.

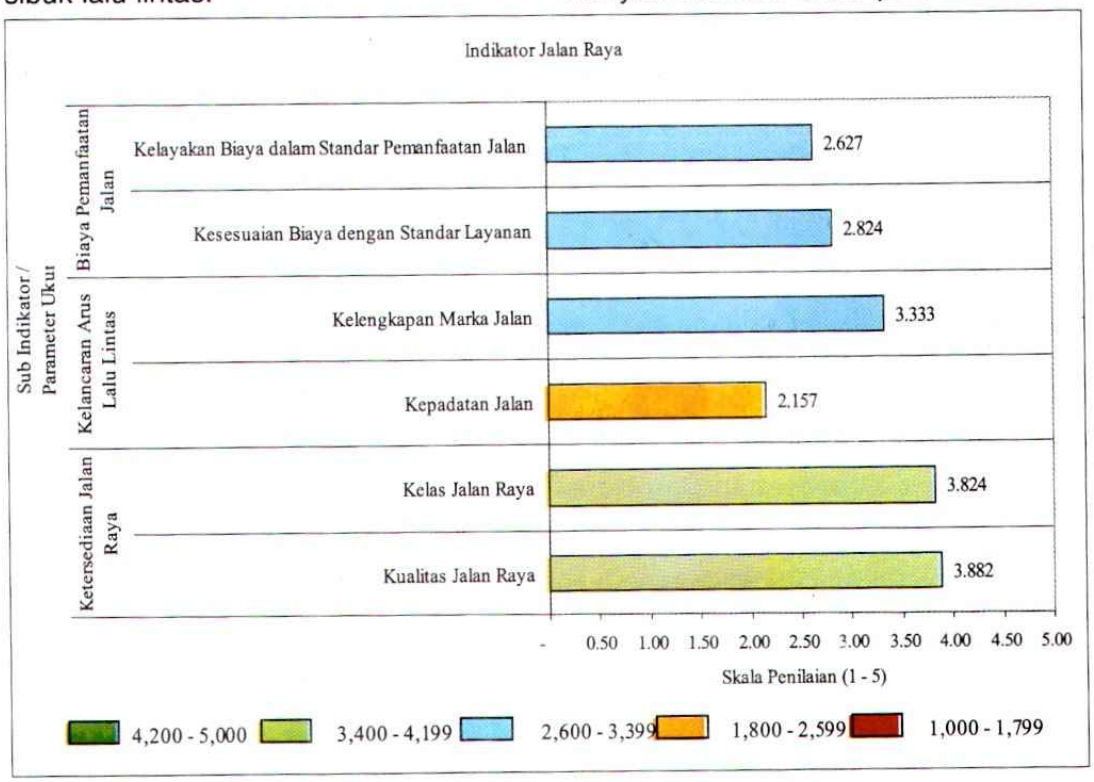

Gambar 10. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Jalan Raya di DKI Jakarta

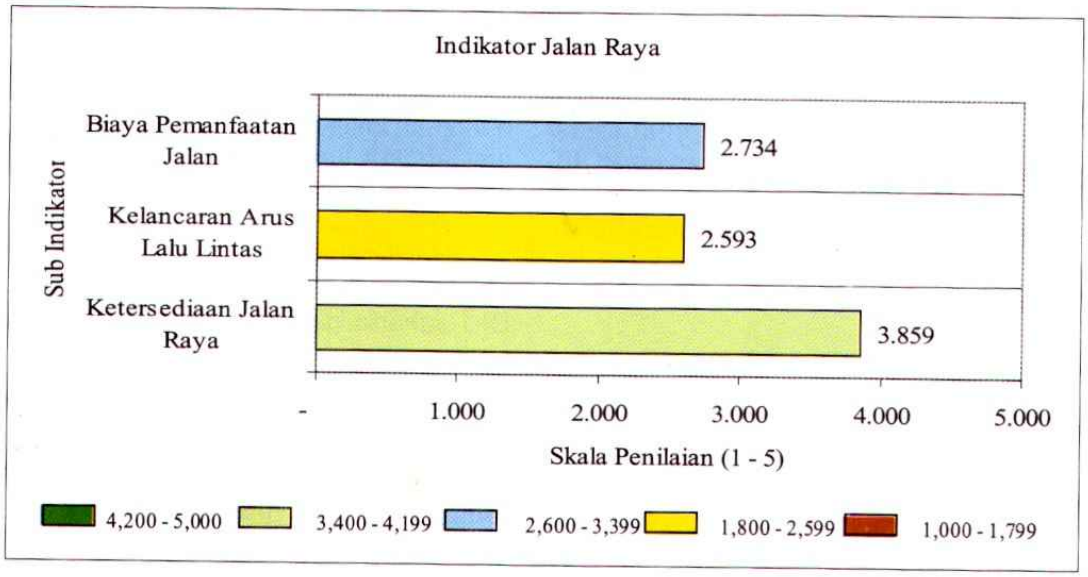

Gambar 11. Penilaian Sub Indikator atas Indikator Jalan Raya di DKI Jakarta

Demikian pula halnya dengan sub indikator yang menunjukkan kelancaran arus lalu lintas yang masih buruk. Sedangkan biaya pemanfaatan jalan berada pada kondisi sedang, dengan kecenderungan buruk.

Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di DKI Jakarta adalah 3,104 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 - 3,399). Prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kelancaran arus lalu lintas, dan mengurangi intensitas pungli di DKI Jakarta.

5. Indikator Kepabeanan Dan Kepelabuhan

Tanjung Priok merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan inter-nasional yang terletak di DKI Jakarta. Fasilitas pelayanan kapal meliputi panjang dermaga sekitar 10.562 m, luas kolam 424 Ha, kedalaman alur -14 mLWS, dan kedalaman kolam -5,5 sampai -12 mLWS. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh kegiatan bongkar dibandingkan kegiatan muat. Penelu-suran yang dilakukan menunjukkan lama waktu yang diperlukan untuk pengurusan pengiriman barang maupun penerimaan barang lewat pelabuhan laut adalah sekitar 2-3 hari. Demikian pula, dengan pengiriman dan penerimaan barang lewat pelabuhan udara. Sedangkan pemeriksaan secara *scaning* maupun sampling sekitar 1 hari.

Selain itu, pelabuhan udara yang ada adalah Halim Perdana Kusuma, dengan lalu lintas penerbangan internasional, penerbangan domestik dan penerbangan lokal masing–masing sebanyak 22.465, 106.280 dan 11.271 penerbangan. Pelabuhan ini memiliki landas pacu aspal dengan panjang 9.843 ft atau 3.000 m dan elevasi 26 m (84 F).

Penilaian parameter ukur menunjukkan bahwa kondisi pabean dan pela-buhan di DKI Jakarta relatif baik. Dua parameter

utama yang dapat dijadikan acuan adalah tingkat kemudahan pro-sedur dan kualitas pelabuhan. Demikian pula yang diperlihatkan pada sub indikator, yang menunjukkan kondisi yang cukup baik, sebagaimana ditun-jukkan oleh performa tiga sub indikator dengan nilai terbobot lebih dari 3,00. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanan dan kepelabuhan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Hasil penilaian untuk indikator kepabeanan dan kepelabuhan di DKI Jakarta adalah 3,175 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,400 – 3,399). Baik parameter ukur maupun sub indikator menunjukkan kondisi yang kondusif.

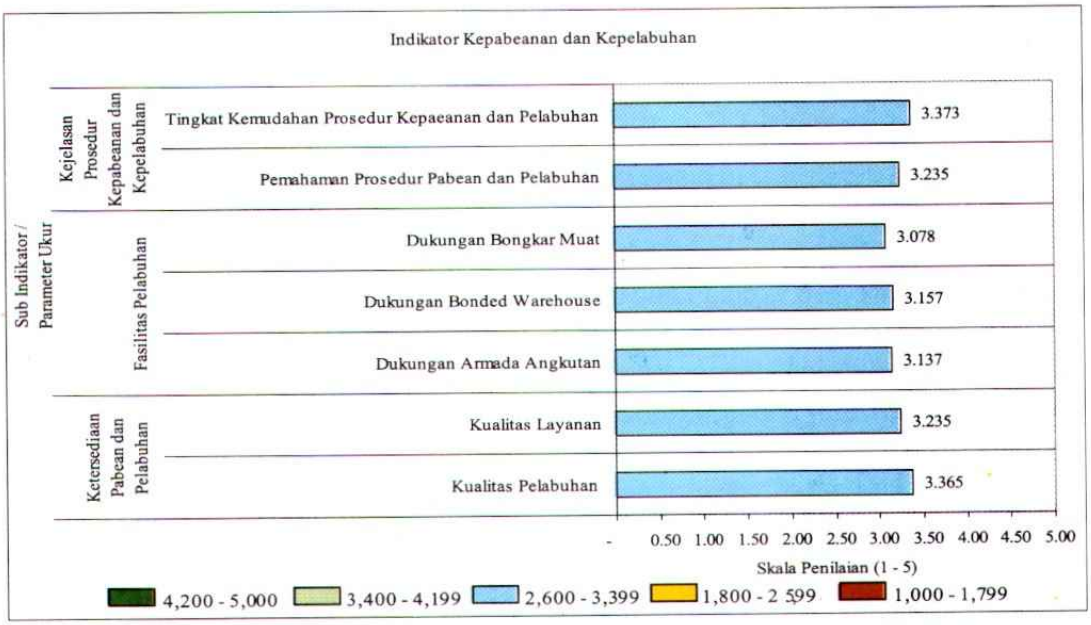

Gambar 12. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Kepabeanan & Kepelabuahan di DKI Jakarta

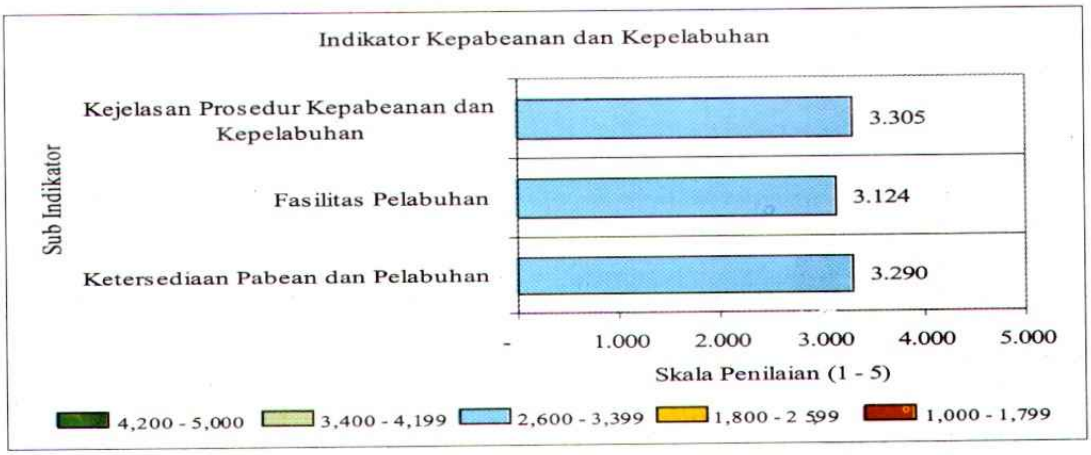

Gambar 13. Penilaian Sub Indikator atas Indikator Kepabeanan & Kepelabuhan

6. Indikator Jasa Infrastruktur Publik

Tenaga listrik di DKI Jakarta sebagian besar dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kebutuhan listrik ini semakin bertambah besar setiap tahunya seperti yang tercermin dari penjualan listrik di wilayah Jakarta sebesar 23,79 KWh. Sementara kebutuhan air bersih dipasok oleh Perusahaan Air Minum (PAM) DKI Jakarta yang memiliki instalasi sebanyak 12 unit dan mampu memproduksi air minum sebanyak 518,99 juta m^3. Jumlah konsumen PAM sebanyak 705.890 pelanggan dengan konsumen terbesar adalah konsumen rumah tangga 89,63 % dan niaga besar/ kecil 8,71%. Produksi gas DKI Jakarta tahun 2004 sebanyak 1.447.687.869 m^3 yang berarti naik 7,18 % dibanding tahun lalu sebesar 1.350.661.938 m^3. Kenaikan produksi ini juga diiringi dengan kenaikan nilai penjualan dari 1.342.020.534 m^3 menjadi 1.456.580.873 m^3.

Penelusuran lapangan atas jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa lama waktu perolehan sambungan listrik di DKI ternyata menunjukkan kecenderungan yang variatif, di mana kisaran waktu untuk mendapatkan layanan ini antara 7-30 hari. Intenistas gangguan listrik, berdasarkan persepsi pelaku usaha antara 2-3 kali dalam satu bulan. Demikian pula dengan perolehan sambungan telepon. Sedangkan kondisi layanan untuk air bersih, kualitas dan debit air yang diterima pelaku usaha relatif buruk. ngan yang variatif, dimana usif. angkan biaya pemanfa

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Kondisi yang ditunjukkan parameter ukur tersebut di atas masih berada pada kategori sedang. Beberapa kondisi yang cenderung buruk adalah kelayakan standar layanan, dan kesesuaian biaya dengan standar. Beberapa kondisi lainnya yang cenderung baik adalah kualitas layanan dan kesesuaian dengan standar yang ada.

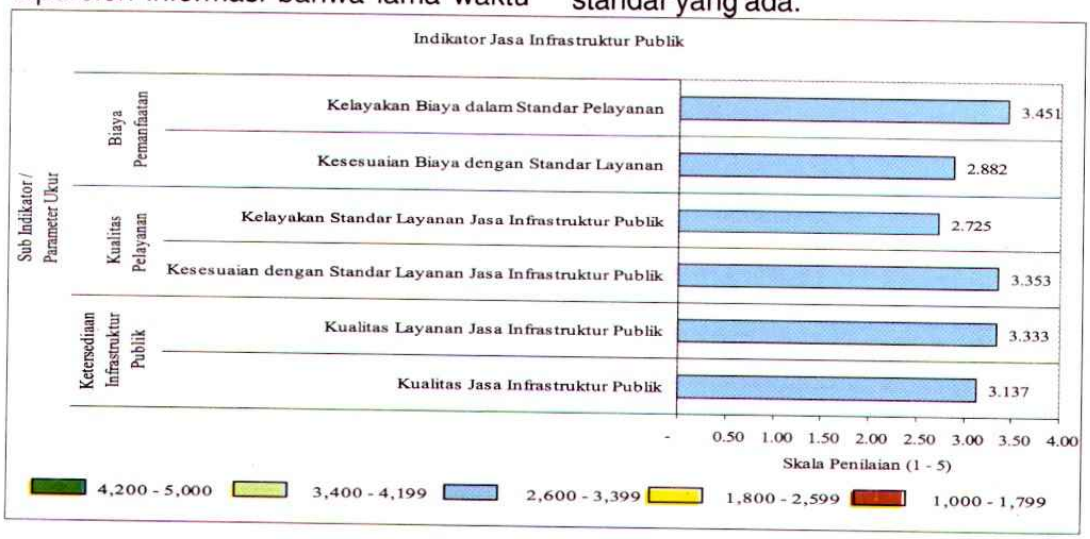

Gambar 14. Penilaian Parameter Ukur atas Indikator Jasa Infrastruktur Publik di DKI Jakarta

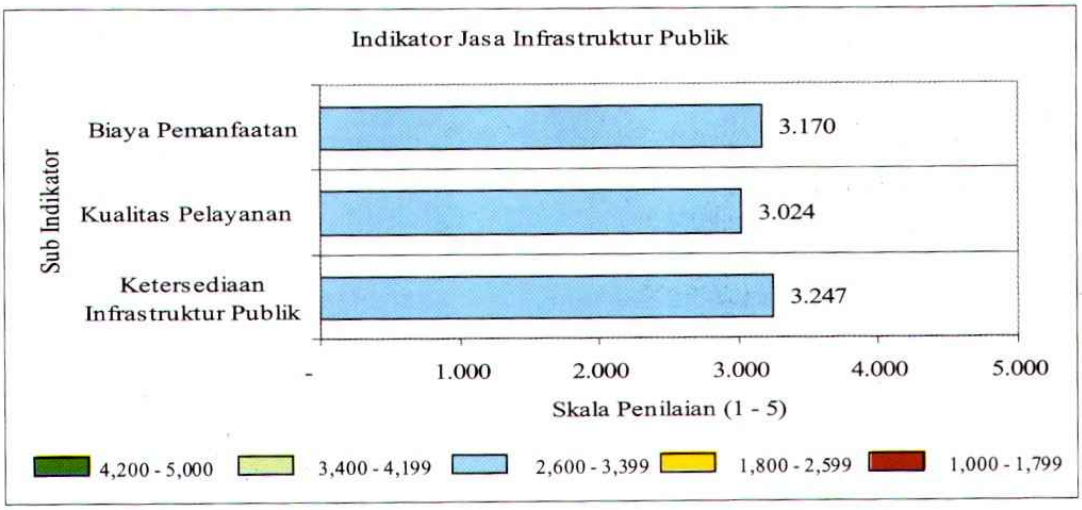

Gambar 15. Penilaian Sub Indikator atas Indikator Jasa Infrastruktur Publik di DKI Jakarta

Sub indikator, sebagaimana ditunjukkan di atas masuk ke dalam kategori sedang, dan memiliki kecenderungan yang baik. Tentunya hal ini merupakan dampak dari baiknya kualitas layanan dan kualitas jasa infastruktur publik yang ada. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian biaya dan kelayakan standar pelayanan.

Hasil penilaian untuk indikator jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta adalah 3.170 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Secara umum, kondisi jasa infrastruktur publik di DKI Jakarta masih cukup baik dan kecenderungannya juga mengarah pada kategori baik.

7. Indikator Tanah / Lahan

Penggunaan tanah di DKI Jakarta seluas 66.152 Ha sebagian besar dipergunakan untuk perumahan 66,19%, industri 6,68%, perkantoran 11,26%, pertamanan 1,38% dan lainnya 14,49%. Terlihat bahwa penggunaan untuk industri relatif kecil karena memang DKI diarahkan sebagai kota jasa. Harga tanah di DKI Jakarta relatif mahal, dan hal tersebut merupakan faktor pembatas untuk melakukan aktivitas bisnis, khususnya industri. Perolehan tanah di DKI juga relatif sulit, di mana daya tampungnya sudah tidak memadai. Kalaupun ada, harganya relatif tinggi dan berada di atas standar rata-rata yang ada. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan yang ada di Jakarta hanya merupakan kantor perwakilan atau kantor pemasaran, sedangkan pabriknya berada di sekitar DKI, seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Penilaian atas parameter ukur perolehan tanah adalah sulit, dan harga tanah yang berada pada tingkat kurang layak / tinggi dibandingkan dengan harga yang berlaku (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)). Namun pada sisi lain, tuntutan atau komplain dari masyarakat relatif rendah dan kelengkapan dokumen tanah / lahan yang memadai. Demikian pula halnya

dengan sub indikator pengadaan tanah menunjukkan kondisi sulit, sedangkan kejelasan status tanah relatif baik. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah / lahan di DKI Jakarta disajikan pada gambar berikut ini:

Hasil penilaian untuk indikator tanah / lahan di DKI Jakarta adalah 2,824 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). DKI Jakarta memang tidak dijadikan acuan untuk pengembangan industri, karena diarahkan pada sektor jasa.

8. Indikator Kondisi Keamanan

Intensitas kriminal di DKI Jakarta

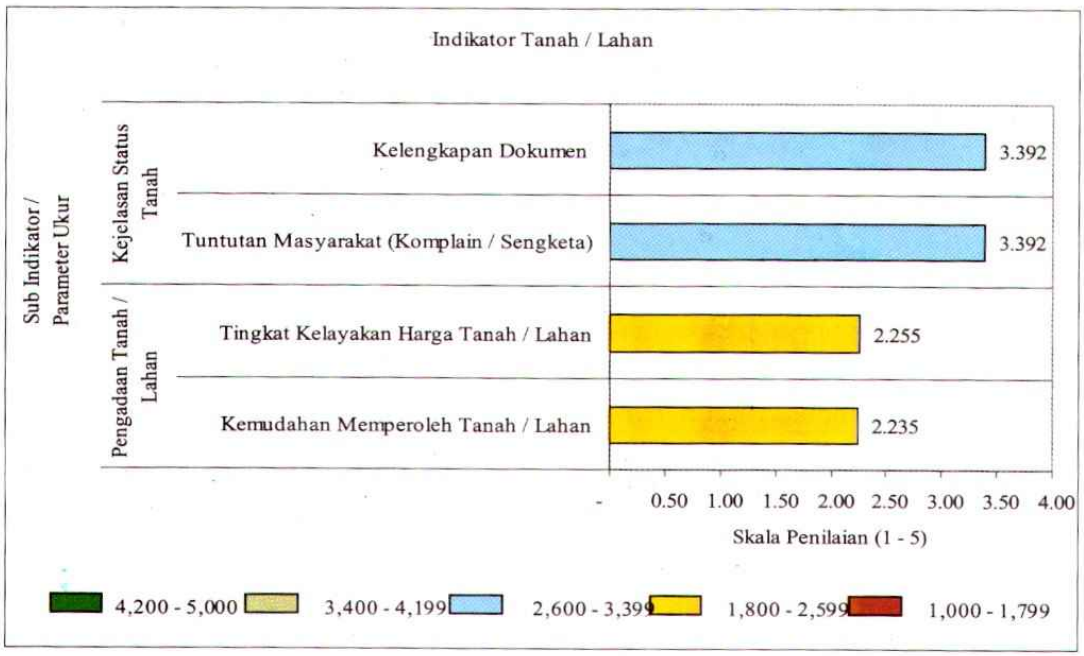

Gambar 16. Penilaian parameter ukur atas indikator tanah dan lahan di DKI Jakarta

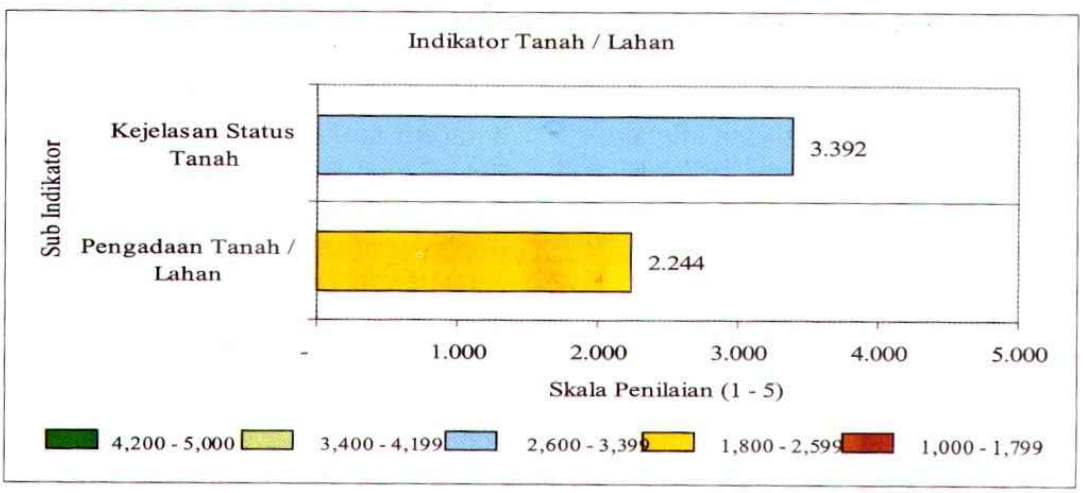

Gambar 17. Penilaian sub indikator atas indikator tanah dan lahan di DKI Jakarta

termasuk tinggi, baik berupa pencurian dan perampokan. Demikian pula dengan intensitas demonstrasi/ unjuk rasa yang seringkali menghambat/ mengganggu aktivitas bisnis di DKI Jakarta. Banyaknya kejahatan/ pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan di DKI Jakarta mencapai 65.519 kasus, tetapi yang berhasil diselesaikan baru sekitar 26,85% atau 17.593 kasus. Jumlah ini relatif tinggi dan akan sangat mengganggu aktivitas bisnis, jika tidak ditangani secara cepat oleh aparat yang berwajib.

Pungli di DKI Jakarta relatif rendah, karena sebagian besar menggunakan jasa keamanan dari satuan keamanan setempat. Meskipun demikian, memang masih terjadi beberapa kasus pungli hingga 5 kali setiap bulannya, dengan besaran nilai antara Rp.100.000 - Rp. 250.000.

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator untuk indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Parameter ukur dan sub indikator di atas memperlihatkan bahwa kondisi keamanan di DKI Jakarta relatif baik, kecuali pada intensitas sengketa / kriminalitas yang tinggi, tetapi dapat segera di atasi karena respon aparat yang cepat. Jenis dan biaya keamanan relatif kecil, sehingga tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Hasil penilaian untuk indikator kondisi

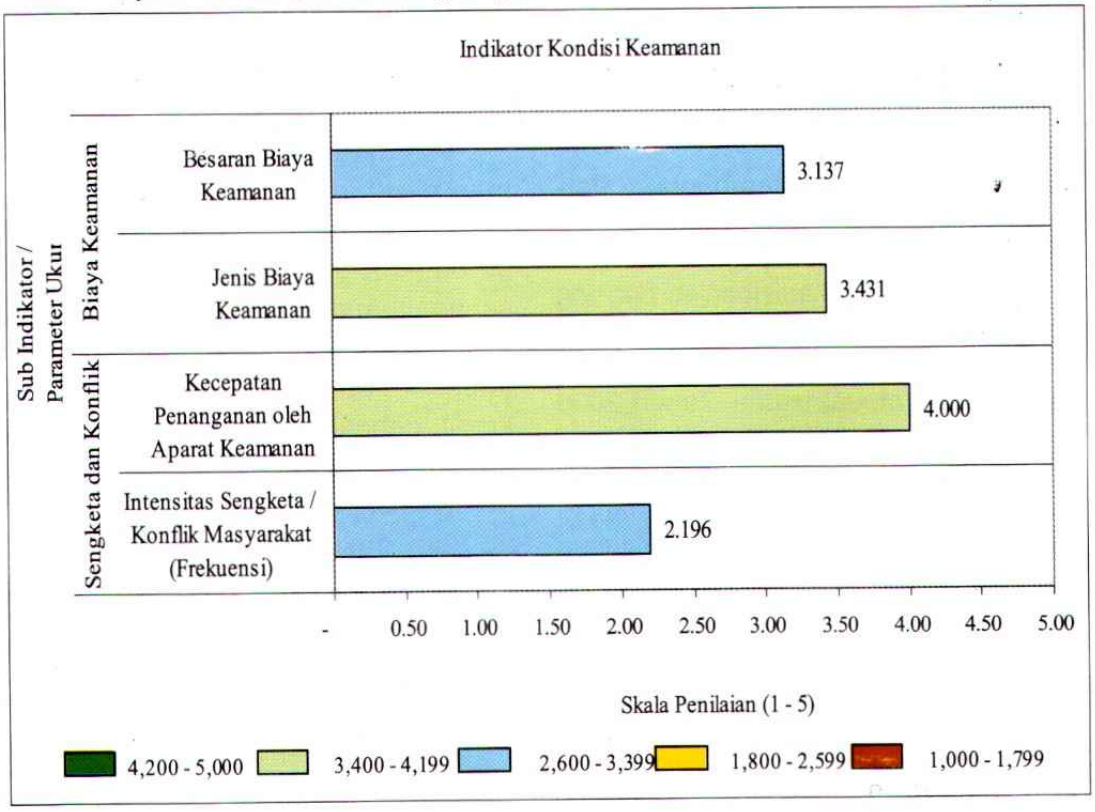

Gambar 18. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta

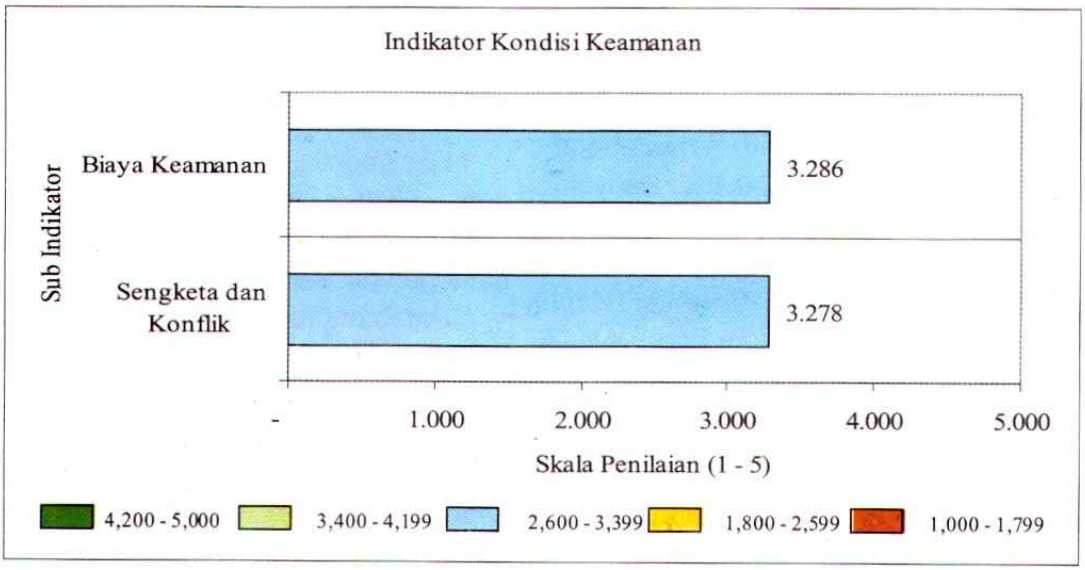

Gambar 19. Penilaian sub indikator atas indikator kondisi keamanan di DKI Jakarta

keamanan di DKI Jakarta adalah 3,282 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya mengurangi intensitas konflik / sengketa / kriminalitas di DKI Jakarta.

9. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan

Ketersediaan lembaga keuangan/ perbankan di DKI Jakarta menjadi pen-ting terkait dengan akses pembiayaan perusahaan untuk mengembangkan / memperluas modal usaha. Tahun 2006 tercatat jumlah bank di DKI Jakarta sebanyak 76 bank dengan jumlah kantor 2.235 buah, baik merupakan bank umum devisa, bank umum bukan devisa maupun bank perkreditan rakyat.

Jumlah total kredit dan valuta asing menurut sektor ekonomi di DKI Jakarta senilai total Rp. 529.361 miliar, yang terdiri atas pertanian (7,81%), pertam-bangan (1,88%), perindustrian (33,14%), perdagangan (29,01%), dan jasa (28,17%).

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta dapat dilihat dalam gambar pada halaman 197.

Penilaian atas parameter ukur memperlihatkan bahwa dalam hal ketersediaan lembaga keuangan / perbankan di DKI Jakarta memadai, sebagaimana disebutkan sebelumnya mencapai 2.235 kantor. Kantor bank tersebut sebagian besar memberikan kredit, dengan persyaratan yang relatif mudah. Namun demikian, meskipun persyaratannya mudah, tetapi penilaian agunan cukup rendah dan bahkan perolehannya pun relatif sulit. Sedang-kan penilaian indikator yang dipengaruhi oleh parameter ukur yang ada menun-jukkan kondisi yang cukup baik.

Hasil penilaian untuk indikator akses pembiayaan perusahaan di DKI Jakarta adalah 3,131 dan termasuk ke dalam

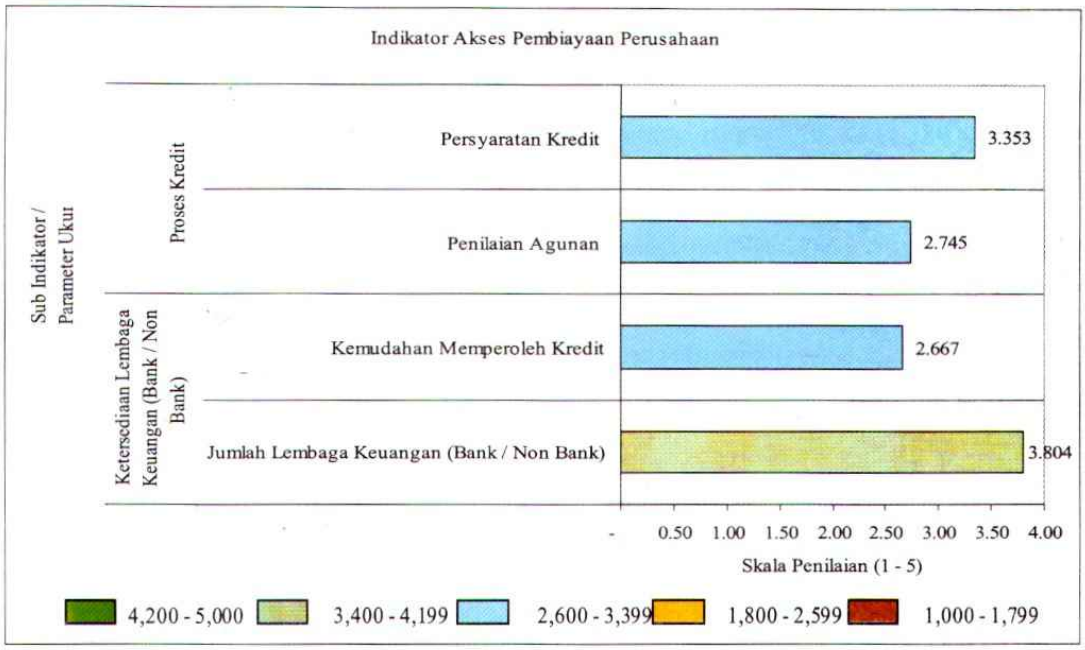

Gambar 20. Penilaian parameter ukur atas indikator akses pembiayaan perusahan di DKI Jakarta

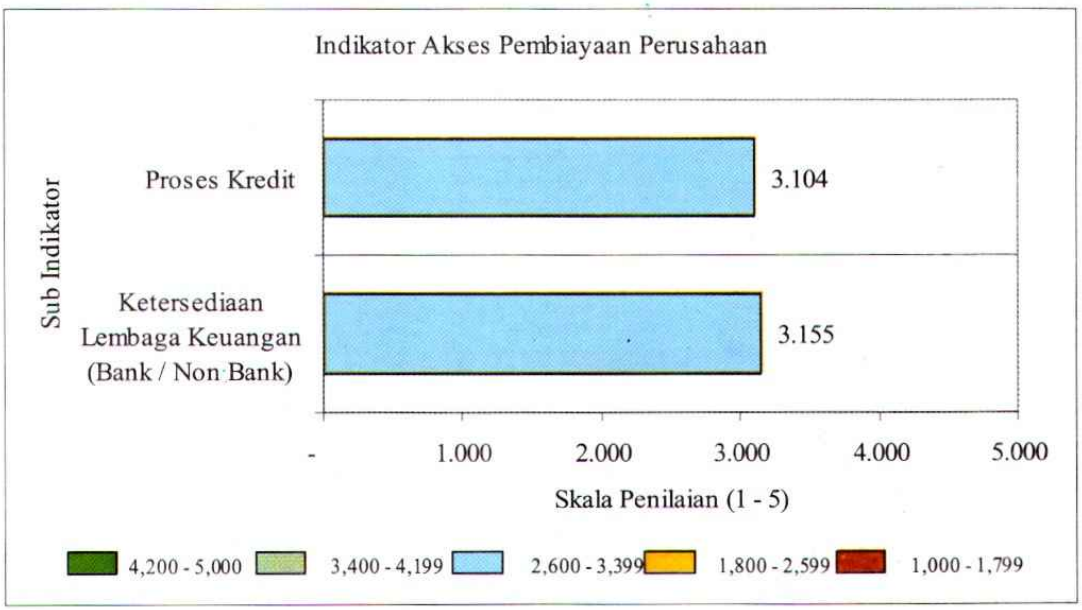

Gambar 21. Penilaian sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahan di DKI Jakarta

kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dengan kecenderungan relatif baik. Dua hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah penilaian agunan yang wajar / layak, serta tingkat kemudahan perolehan kredit.

10. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis

DKI Jakarta merupakan lokasi yang memiliki akses usaha yang, baik dilihat dari kedekatannya dengan akses pasar, akses teknologi, dan akses tenaga kerja. Sedangkan untuk akses bahan baku, DKI cenderung sudah tidak memiliki sumber daya alam sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Statistik ekspor impor di DKI Jakarta menun-jukkan bahwa nilai ekspor naik dari US$ 20,45 miliar pada tahun 2003 menjadi US$ 22,44 miliar pada tahun 2004 atau naik sekitar 9,69%. Di sisi lain, nilai impor juga naik 31,96 persen dari US$ 16,17 miliar tahun 2003 menjadi US$ 21,34 miliar tahun 2004.Kebijakan dan komitmen pemda DKI Jakarta pun relatif baik, dengan memberikan berbagai fasilitas bagi pelaku industri yang ada, termasuk upaya-upaya pembinaan.

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Parameter ukur memperlihatkan akses distribusi dan akses teknologi pada kategori baik; dan akses tenaga kerja termasuk ke dalam kategori cukup lancar. Sedangkan akses bahan baku dan akses pasar dinilai kurang lancar. Dalam hal bahan baku, memang DKI Jakarta kesulitan dalam memperolehnya karena memang tidak memiliki sumber daya yang memadai; sedangkan akses pasar lebih dimungkinkan adanya kelesuan pasar pada beberapa produk yang dipasarkan sehingga dinilai kurang lancar oleh pelaku usaha. Komitmen pemda dinilai baik oleh pelaku usaha, sedangkan pembinaan, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi menunjukkan kecenderungan mendekati kategori buruk.

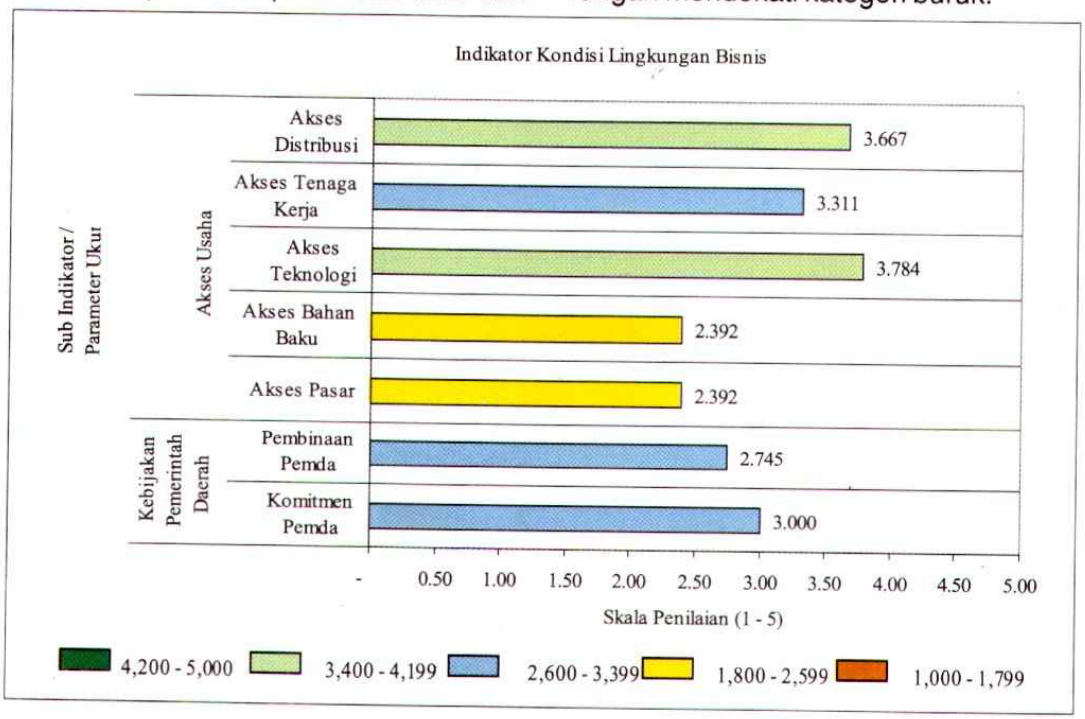

Gambar 22. Penilaian parameter ukur atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta

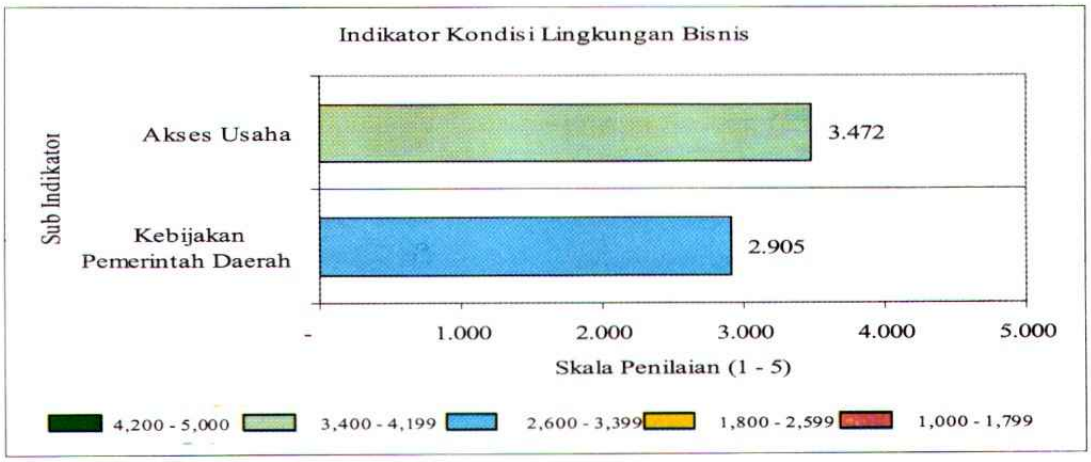

Gambar 23. Penilaian Sub indikator atas indikator kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta

Berdasarkan nilai parameter ukur yang diintegrasikan dengan bobot masing-masing sub indikator, ternyata menunjukkan bahwa akses usaha secara umum masuk ke dalam kategori baik; demikian pula halnya dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kondisi lingkungan bisnis di DKI Jakarta secara umum berada pada nilai 3,138 dan termasuk ke dalam kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,399), dan memiliki kecenderungan ke arah baik. Akses pasar dan bahan baku merupakan prioritas yang perlu ditangani oleh pemda setempat untuk meningkat-kan akses usaha secara keseluruhan.

Iklim Usaha Perdagangan DKI Jakarta

Hasil penilaian atas iklim usaha di DKI Jakarta adalah 3,178 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600 – 3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim usaha perdagangan di DKI Jakarta adalah adalah kondisi keamanan (3,282), peraturan ketenagakerjaan (3,191), dan kepabeanan – kepelabuhan (3,175). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,587), kondisi tanah / lahan (2,824), dan perizinan (2,893). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

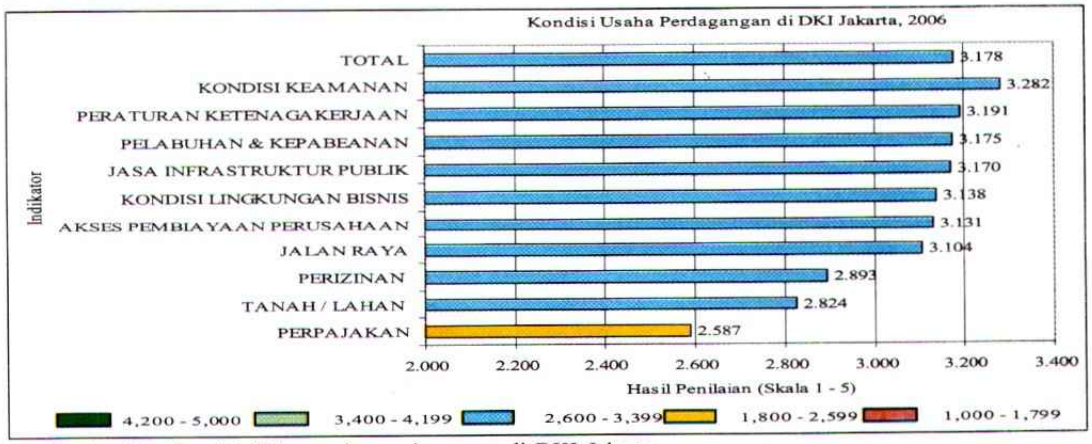

Gambar 24. Kondisi iklim usaha perdagangan di DKI Jakarta

Kondisi iklim usaha perdagangan atas empat komoditi dan satu sektor perhotelan berdasarkan persepsi masing-masing pelaku usaha dinilai sebagai berikut : (a) komoditi makanan dan minuman 3,380; (b) komoditi alas kaki 3,267; (c) komoditi TPT 2,915; (d) komoditi bahan dan barang kimia 3,278; dan (f) perhotelan 3,232. Semuanya menunjukkan kondisi yang masuk ke dalam kategori cukup kondusif. Semua komoditi tersebut memperlihatkan kecenderungan yang baik.

KESIMPULAN

Menurut hasil kajian, kondisi iklim usaha perdagangan di DKI Jakarta masih berada dalam kategori sedang. Indikator "kondisi keamanan" yang men-duduki posisi teratas (nilai 3,282) dari semua indikator yang diuji masih dapat diperdebatkan mengingat maraknya demonstrasi belakangan ini oleh serikat-serikat pekerja atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli pada nasib karyawan suatu perusahaan dan memicu konflik antara karyawan dengan manajemen perusahaan dan dengan karyawan lain yang berlawanan arus. Jika ini terjadi secara terus-menerus, proses produksi akan terganggu dan pa-da akhirnya akan memengaruhi seluruh rangkaian kegiatan usaha. Namun demikian, persepsi pengusaha terhadap kondisi keamanan justru dinilai positif, terutama dalam hal kecepatan penanganan sengketa/ konflik oleh aparat keamanan. Hal yang seharusnya menjadi ciri keamanan berbisnis adalah rendahnya intensitas sengketa/konflik dan kecilnya permasalahan yang dihadapi. Di DKI Jakarta, intensitas perselisihan ini dinilai cukup rendah sehingga tidak terlalu mengganggu jalannya usaha.

Sementara itu, ditinjau dari segi biaya keamanan, tampaknya para pengusaha dapat menerima besaran yang dibebankan karena berada pada batas kewajaran. Aspek manajemen internal perusahaan diduga lebih ber-peran sebagai upaya pencegahan perselisihan/ sengketa/konflik dan sekaligus sebagai upaya menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif dalam berusaha dibandingkan dengan upaya-upaya penyelesaiannya. Selanjut-nya, hanya ada satu indikator yang masuk dalam kategori buruk di DKI Jakarta, yaitu "perpajakan" (nilai 2,587).

Masalah-masalah yang berkait-an dengan perpajakan dipandang tidak mendukung kelangsungan usaha perdagangan. Rendahnya kejelasan prosedur perpajakan dengan banyaknya jenis pajak daerah serta besaran tarif yang dibebankan diduga cukup mengurangi apresiasi terhadap pengenaan pajak daerah kepada para pengusaha. Demi-kian juga dengan banyaknya jenis dan tarif retribusi daerah dengan jangka waktu

pengurusan layanan pajak serta kelayakan biaya pelayanan perpajakan, semuanya dinilai masih kurang memuaskan pengusaha. Hal ini setidaknya tergambar dari aspek-aspek pendukung yang masuk dalam kategori sedang. Karena perpajakan adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah, maka aspek-aspek yang memudahkan dan meringankan pengusaha berkaitan dengan pajak dan retribusi perlu ditinjau kembali dan dicarikan penyelesaian yang lebih layak dan masuk akal untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Productivity Organization, *Total Factor Productivity Growth: Survey Report*, Tokyo: Asian Productivity Organization, 2004.

Claros, Augusto López, et al, *The Global Competitiveness Report 2005-2006: Policies Underpinning Rising Prosperity*, England: World Economic Forum/ Palgrave Macmillan, 2005.

Firdausy, Carunia Mulya, *Productivity Performance in Developing Countries: Country Case Studies Indone-sia*, Austria: United Nations Industrial Development Organization, November 2005.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia 2003 Persepsi Dunia Usaha: Peringkat 200 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Dae-rah, 2003.

Porter, Michael E., et al, *The Global Competitiveness Report* **2001-2002,** England: World Economic Forum/ Palgrave Macmillan, 2002.

The International Institute for Management Development, *IMD World Competitiveness Yearbook 2005*, Lausanne, Switzerland: The International Institute for Management Development, 2005.